

DAFTAR PUSTAKA

- Assidiqie, Jimly. 2008. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta :BIP.
- Abdul Halim dan Theresia Damayanti. 2007. *Teori dan Metode Pengawasan*. Jakarta :PT Gramedia Pustaka.
- Achmad, Rostandi. 1992. *Responsi Filsafat Hukum*. Bandung: Armico.
- Asmara, Galang. 2005. *Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*, Yogyakarta : Laksbang.
- Asmara, Galang. 2012. *Ombudsman Republik Indonesia*. Jakarta :Laksbang Justitia.
- Daim, A Nuryanto. 2014, *Hukum Administrasi*, Surabaya :Laksbang Justitia.
- Darmonodiharjo, Darji. 2004. *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta :Gramedia.
- Friedman, Lawrence. 1984. "American Law". London: W.W. Norton & Company
- Handoko, Hani. 2003. *Manajemen Edisi Kedua*, Yogyakarta: BPFE.
- Ibrahim, Johnny. 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing..
- Joko Widodo. 2001, "Good Governance", Surabaya: Insan Cendikia.
- Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik Sudraja. 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung :Nuansa Cendekia.
- Kelsen, Hans, Raisul Muttaqien (translator), 2013, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung; Nusa Media.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 1997, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Jilid II, Edisi Ketiga*, Jakarta: PT. Gunung Agung.

- Nurtjahjo, Hendra, Yustus Maturbongs, Diani Indah Rachmitasari. 2013. *Memahami Maladministrasi cet. I*, Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia.
- Mardiasmo, 2004, *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: Andi.
- Pasalong Harbani, 2011, *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pratikno. 2003. *Relevansi pembentukan Ombudsman Daerah dalam Ombudsman Daerah, Mendorong Pemerintahan Yang Bersih*, Kerjasama PUSHAM UII dengan Partnership Kemitraan dan Governance Reform di Indonesia.
- Tamrin, Husni. 2013. *hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, Jakarta :Aswaja Pressindo.
- Sesariato, Rahardi. 2012. *Peran LOD (Lembaga Ombudsman Daerah) Provinsi DIY Terhadap Pengawasan Pelayanan Publik Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sujata, Antonius, dkk. *Ombudsman Indonesia, Masa Lalu, Sekarang dan Masa Mendatang*. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional. 2002.
- Sumaryadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat (terjemahan)*. Jakarta: CV. Citra Utama
- Steers Richard M. 2005. *Efektivitas Organisasi (Terjemahan)*. Jakarta: Erlangga

JURNAL

- Hidayati, Nadia., Indra Wardhana, Hudly Gumilar, Sandry Sianipar, Dewi Mutiara dan Kartika. 2008. Perbandingan administrasi Publik antara Swedia dan Indonesia Jurnal: Administrasi publik, vol 5 No.2.
- Nurul Laili Fadhilah, *Urgensitas Ombudsman Dalam Pengawasan Pelayanan Publik*, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 2008, Nomor 2, Agustus 2015.
- Ria Novia Sari, *Efektivitas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau Dalam Menyelesaikan Laporan Masyarakat Dibidang Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Ombudsman Republik Indonesia Di Provinsi Riau Tahun 2013-2014*, Jurnal Fakultas Hukum Volume III, No.2, Oktober 2016.

Setiajeng Kadarsih, *Tugas Dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pelayanan Publik Menurut Uu No. 37 Tahun 2008*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 2 Mei 2010.

Widi Nugrahaningsih, *Implementasi Good Governance Dengan Dasar Uu No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Di Kota Surakarta*, Jurnal Good Governance Volume 10 Nomor 1, Maret 2014.

Bobaru , Ana Daniela, *European Ombudsman and His Rule In The European Union*. Analele Universitati “Constantin Brancusi” din Targu Jiu. Serie stiinte Sociale. 2015.

Pegram , Thomas, *Accountability in hostile Times: the Case of The Peruvian Humam Rights Ombudsman 1996-2001*. Journal of Latin America Studies, Cambridge Vol.40, iss 1 (Feb 2008)

O’Brien Nick, *What Future For The Ombudsman*, Political Quarterly Vol 86 Issue 1, Jan-Mar 2015

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang- Undang Republic Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Ombudsman Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.